

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN BATAN
Nomor: SOP 040.002/OT 02 01/KA**



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2014**


**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**Nomor : SOP 040.002/
OT 02 01/KANo. Revisi/
Terbitan : 0 / 1**SOP PENYUSUNAN
KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN BATAN**

Tgl. Berlaku : 18 Agustus 2014

Halaman : 2 dari 18


LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan	1. Imawan Alfin, SH	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran		18-8-14
	2. Ir. Kunuz Nikmah, MA.Sc.	Kepala Bagian Perencanaan Program		18-8-14
Diperiksa	1. Drs. Budi Santoso, M.Eng.	Kepala Biro Perencanaan		18-8-14
	2. Ir. Hadi Susilo	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi		18-8-14
Disahkan	Falconi Margono S	Sekretaris Utama		18-8-14

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 040.002/ OT 02 01/KA
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN	Tgl. Berlaku : 18 Agustus 2014
		Halaman : 4 dari 18

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
DAFTAR ISI	4
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. TANGGUNG JAWAB	5
4. DEFINISI	6
5. REFERENSI	7
6. SOP	8
6.1. SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Program Kepala BATAN	10
6.2. SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Program Deputy/Settama	14
6.3. SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Kegiatan Satuan Kerja.....	16

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 040.002/ OT 02 01/KA
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN	Tgl. Berlaku : 18 Agustus 2014
		Halaman : 5 dari 18

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara penyusunan kebijakan strategis program/kegiatan BATAN agar sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).


2. RUANG LINGKUP

SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Program/Kegiatan BATAN meliputi :

- 2.1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- 2.3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- 2.4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- 2.5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Kepala BATAN bertanggung jawab dalam hal:
 - 3.1.1. ketepatan penetapan visi dan misi BATAN;
 - 3.1.2. ketepatan penetapan Program BATAN;
 - 3.1.3. ketepatan penetapan Renstra BATAN;
 - 3.1.4. kebenaran penyusunan RKA-KL dan DIPA BATAN;
 - 3.1.5. kebenaran Penyusunan LAKIP.
- 3.2. Deputi Kepala BATAN bertanggung jawab dalam hal:
 - 3.2.1. ketepatan penetapan Renstra Deputi;
 - 3.2.2. ketepatan penetapan Kinerja Deputi;
 - 3.2.3. kebenaran penyusunan LAKIP Deputi.
- 3.3. Sekretaris Utama bertanggung jawab dalam hal:
 - 3.3.1. ketepatan penetapan Renstra Sekretariat Utama;
 - 3.3.2. ketepatan penetapan Kinerja Sekretariat Utama;
 - 3.3.3. kebenaran penyusunan RKA-K/L dan DIPA BATAN;
 - 3.3.4. kebenaran penyusunan LAKIP Sekretariat Utama.


	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 040.002/ OT 02 01/KA
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN	Tgl. Berlaku : 18 Agustus 2014
		Halaman : 6 dari 18

- 3.4. Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja (Satker) bertanggung jawab dalam hal:
 - 3.4.1. ketepatan penetapan Renstra Unit Kerja;
 - 3.4.2. ketepatan penetapan Kinerja Unit Kerja;
 - 3.4.3. kebenaran penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satuan Kerja;
 - 3.4.4. kebenaran penyusunan LAKIP Unit Kerja.
- 3.5. Tim Penyusun Renstra bertanggung jawab dalam hal kebenaran perumusan konsep Renstra.
- 3.6. Kepala Biro Perencanaan bertanggung jawab dalam hal kebenaran penyusunan konsep Renstra BATAN, RKA-K/L dan DIPA BATAN, dan LAKIP BATAN.


4. DEFINISI

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

- 4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPN merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.
- 4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda Pembangunan Nasional memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.
- 4.3. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga.
- 4.4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 040.002/ OT 02 01/KA
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN	Tgl. Berlaku : 18 Agustus 2014
		Halaman : 7 dari 18

- 4.5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 4.6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 4.7. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
- 4.8. Renstra BATAN adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil secara sistematis yang berkelanjutan dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, program yang dijadikan acuan oleh unit kerja dalam menyusun Rencana Strategis unit kerja.
- 4.9. Dokumen Rencana Kerja-Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- 4.10. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana kegiatan selama setahun yang disusun oleh unit kerja/kementerian negara/lembaga negara.
- 4.11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen yang wajib dibuat oleh kementerian negara/lembaga negara yang berisi rancangan anggaran, pendapatan dan belanja kementerian negara/lembaga negara yang disusun menurut unit organisasi dan kegiatan berdasarkan rencana kerja kementerian negara/lembaga negara yang telah disesuaikan dengan pagu sementara yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- 4.12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kementerian negara/lembaga dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) atau Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
- 4.13. Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi/satker/unit organisasi.
- 4.14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media penyampaian pertanggungjawaban atas capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran suatu unit/satker/instansi pemerintah.

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 040.002/ OT 02 01/KA
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN	Tgl. Berlaku : 18 Agustus 2014
		Halaman : 8 dari 18

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 5.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 5.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5.6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178).
- 5.7. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) tahun 2010-2014.
- 5.8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- 5.9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 5.10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur.
- 5.11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara BATAN.
- 5.12. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 5.13. Peraturan Kepala BATAN Nomor 230/KA/XII/2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan dan Kode Klasifikasi.
- 5.14. Peraturan Kepala BATAN Nomor 231/KA/XII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

6. SOP

Diagram alir SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Program/Kegiatan BATAN dapat dilihat pada tabel berikut ini:



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN BATAN**

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 9 dari 18

Dasar Hukum:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
3. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) tahun 2010-2014
4. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara BATAN

Keterkaitan:

Peringatan:

Penyusunan kebijakan strategis program/kegiatan BATAN agar sesuai dengan RPJPN dan RPJMN

Kualifikasi Pelaksana:

- Memahami Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- Memahami tugas pokok dan fungsi BATAN, Lingkungan Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan:

- Dokumen Evaluasi Kegiatan dan Anggaran tahun sebelumnya
- RPJPN
- RPJMN



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 10 dari 18

6.1. SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Program Kepala BATAN

NO	PROSES	Pelaksana									Mutu Baku Kelengkapan / Standar				
		Ka. BATAN	Para Deputi/ Sestama	Tim	Ka. BP	Inspektorat	Bappe-nas	Kemen PANRB	Kemen-keu	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
6.1.1.	Menetapkan visi dan misi BATAN											<ul style="list-style-type: none"> UU No.10 Tahun 1997 UU No.18 Tahun 2002 UU No 25 Tahun 2004 UU No 17 Tahun 2007 	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Visi dan Misi BATAN 	
6.1.2.	Merumuskan Program dan Kegiatan BATAN											<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Visi dan Misi BATAN 	8 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Program dan Kegiatan BATAN 	
6.1.3.	Menyusun konsep Renstra BATAN											<ul style="list-style-type: none"> Program dan Kegiatan BATAN Dokumen Visi dan Misi BATAN 	6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Renstra BATAN Revisi A 	
6.1.4.	Mengoreksi konsep Renstra BATAN											<ul style="list-style-type: none"> Konsep Renstra BATAN Revisi A Dokumen Visi dan Misi BATAN 	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Renstra BATAN Revisi B 	
6.1.5.	Menetapkan Renstra BATAN											<ul style="list-style-type: none"> Konsep Renstra BATAN Revisi B 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Renstra BATAN Revisi 0 	



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 11 dari 18

NO	PROSES	Pelaksana									Mutu Baku Kelengkapan / Standar				
		Ka. BATAN	Para Deputi/ Sestama	Tim	Ka. BP	Inspektorat	Bappe-nas	Kemen PANRB	Kemen-keu	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
6.1.6.	Menyusun konsep RKT BATAN											• Dokumen Renstra BATAN	2 bulan	• Konsep RKT BATAN Revisi A	
6.1.7.	Mengoreksi RKT BATAN											• Konsep RKT BATAN Revisi A	1 minggu	• Konsep RKT BATAN Revisi B	
6.1.8.	Menetapkan RKT BATAN											• Konsep RKT BATAN Revisi B	1 minggu	• Dokumen RKT BATAN Revisi 0	
6.1.9.	Menyusun konsep RKA-K/L BATAN											• Dokumen RKT BATAN • PMK dan KMK	6 bulan	• Konsep RKA-K/L BATAN Revisi A	Dalam rangka penerbitan DIPA INDUK BATAN
6.1.10.	Mengoreksi RKA-K/L BATAN											• Konsep RKA-K/L BATAN Revisi A	1 minggu	• Konsep RKA-K/L BATAN Revisi B	



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 12 dari 18

NO	PROSES	Pelaksana									Mutu Baku Kelengkapan / Standar			
		Ka. BATAN	Para Deputi/ Sestama	Tim	Ka. BP	Inspek-torat	Bappe-nas	Kemen PANRB	Kemen-keu	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.1.11.	Menetapkan RKA-K/L BATAN										<ul style="list-style-type: none"> Konsep RKA-K/L BATAN Revisi B 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKA-K/L BATAN Revisi 0 	
6.1.12.	Menerima dokumen DIPA INDUK BATAN yang telah disahkan oleh Kemenkeu dan memerintahkan untuk tindak lanjut										<ul style="list-style-type: none"> DIPA INDUK BATAN 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> DIPA INDUK BATAN Disposisi Ka. BATAN 	
6.1.13.	Menyusun konsep PK BATAN										<ul style="list-style-type: none"> DIPA INDUK BATAN Dokumen Renstra BATAN Dokumen RKT BATAN 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Konsep PK BATAN Revisi A 	
6.1.14.	Mengoreksi konsep PK BATAN										<ul style="list-style-type: none"> Konsep PK BATAN Revisi A 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Konsep PK BATAN Revisi B 	
6.1.15.	Menetapkan PK BATAN										<ul style="list-style-type: none"> Konsep PK BATAN Revisi B 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen PK BATAN Revisi 0 	



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN BATAN**

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 13 dari 18

NO	PROSES	Pelaksana									Mutu Baku Kelengkapan / Standar				
		Ka. BATAN	Para Deputi/ Sestama	Tim	Ka. BP	Inspektorat	Bappe-nas	Kemen PANRB	Kemen-keu	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
6.1.16.	Melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian PK BATAN											• Dokumen PK BATAN	12 bulan	• Laporan Kinerja • Laporan Keuangan	Setiap triwulan
6.1.17.	Menyusun konsep LAKIP BATAN											• Laporan Kinerja • Laporan Keuangan	3 bulan	• Konsep LAKIP Revisi A	
6.1.18.	Mengoreksi konsep LAKIP BATAN											• Konsep LAKIP Revisi A	1 minggu	• Konsep LAKIP Revisi B	
6.1.19.	Menetapkan LAKIP BATAN											• Konsep LAKIP Revisi B	1 minggu	• Dokumen LAKIP BATAN Revisi 0	


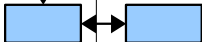
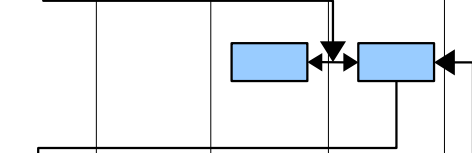

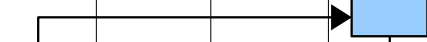
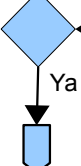


BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 14 dari 18

6.2. SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Program Deputi/Settama

NO	PROSES	Pelaksana							Mutu Baku Kelengkapan / Standar			
		Para Deputi/ Settama	Ka. Unit Kerja	Tim	Ka. BP	Ka. BATAN	Inspektorat	Kemen PANRB	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.2.1.	Menetapkan visi dan misi Deputi/Settama								<ul style="list-style-type: none"> • Renstra BATAN • Perpres tentang BATAN 	1 bulan	• Dokumen Visi dan Misi Deputi/Settama	
6.2.2.	Merumuskan Program dan Kegiatan Deputi/Settama								<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Visi dan Misi Deputi/Settama 	4 bulan	• Program dan Kegiatan Deputi/Settama	
6.2.3.	Menyusun konsep Renstra Deputi/Settama								<ul style="list-style-type: none"> • Program dan Kegiatan Deputi/Settama • Dokumen Visi dan Misi Deputi/Settama 	1 bulan	• Konsep Renstra Deputi/Settama	
6.2.4.	Menetapkan Renstra Deputi/Settama								<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Renstra Deputi/Settama 	1 bulan	• Dokumen Renstra Deputi/Settama	
6.2.5.	Menyusun konsep RKT Deputi/Settama								<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Renstra Deputi/Settama 	4 bulan	• Konsep RKT Deputi/Settama	
6.2.6.	Menetapkan RKT Deputi/Settama								<ul style="list-style-type: none"> • Konsep RKT Deputi/Settama 	2 bulan	• Dokumen RKT Deputi/ Settama	



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN BATAN**

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 15 dari 18

NO	PROSES	Pelaksana							Mutu Baku Kelengkapan / Standar			
		Para Deputi/ Settama	Ka. Unit Kerja	Tim	Ka. BP	Ka. BATAN	Inspek- torat	Kemen PANRB	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.2.7.	Menyusun konsep PK Deputi/Settama								<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Renstra Deputi/ Settama Dokumen RKT Deputi/ Settama 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Konsep PK Deputi/Settama 	
6.2.8.	Menetapkan PK Deputi/Settama							<ul style="list-style-type: none"> Konsep PK Deputi/Settama 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen PK Deputi/Settama 		
6.2.9.	Melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian PK Deputi/Settama							<ul style="list-style-type: none"> Dokumen PK Deputi/Settama 	12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja 	Setiap triwulan	
6.2.10.	Menyusun konsep LAKIP Deputi/Settama							<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Konsep LAKIP Deputi/Settama 		
6.2.11.	Menetapkan LAKIP Deputi/Settama							<ul style="list-style-type: none"> Konsep LAKIP Deputi/Settama 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen LAKIP Deputi/Settama 		



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN BATAN

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 16 dari 18

6.3. SOP Penyusunan Kebijakan Strategis Kegiatan Satuan Kerja

NO	PROSES	Pelaksana								Mutu Baku Kelengkapan / Standar			
		Ka. Unit Kerja/Satker	Tim	Ka. BP	Sestama	Para Deputi	Ka. BATAN	Inspektorat	Kemenkeu	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.3.1.	Menetapkan visi dan misi Unit Kerja berdasarkan visi dan misi Deputi/Settama									<ul style="list-style-type: none"> Renstra Deputi/Settama Perpres tentang BATAN Perka BATAN tentang OTK BATAN 	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Visi dan Misi Unit Kerja 	
6.3.2.	Merumuskan Program dan Kegiatan Unit Kerja									<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Visi dan Misi Unit Kerja 	4 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kegiatan Unit Kerja 	
6.3.3.	Menyusun konsep Renstra Unit Kerja									<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kegiatan Unit Kerja 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Renstra Unit Kerja 	
6.3.4.	Menetapkan Renstra Unit Kerja									<ul style="list-style-type: none"> Konsep Renstra Unit Kerja 	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Renstra Unit Kerja 	
6.3.5.	Menyusun dan menetapkan RKT Unit Kerja									<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Renstra Unit Kerja 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKT Unit Kerja 	



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN BATAN**

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 17 dari 18

NO	PROSES	Pelaksana								Mutu Baku Kelengkapan / Standar				
		Ka. Unit Kerja/Satker	Tim	Ka. BP	Sestama	Para Deputi	Ka. BATAN	Inspektorat	Kemenkeu	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
6.3.6.	Menyusun RKA-K/L Unit Kerja										<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKT Unit Kerja PMK dan KMK 	2 bulan	<ul style="list-style-type: none"> RKA-K/L Unit Kerja 	
6.3.7.	Meneliti dan mereviu RKA-K/L Unit Kerja serta mengkompilasi perbaikan dari Unit Kerja										<ul style="list-style-type: none"> RKA-K/L Unit Kerja 	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKA-K/L BATAN 	
6.3.8.	Menyampaikan RKA-K/L Unit Kerja ke Kemenkeu										<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKA-K/L BATAN 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Tanda Terima 	
6.3.9.	Menerima pengesahan DIPA Petikan Satuan Kerja yang telah disahkan oleh Kemenkeu										<ul style="list-style-type: none"> DIPA Petikan Satuan Kerja 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> DIPA Petikan Satuan Kerja 	
6.3.10.	Menyusun dan menetapkan PK Unit Kerja										<ul style="list-style-type: none"> DIPA Petikan Satker Dokumen Renstra Unit Kerja Dokumen RKT Unit Kerja 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen PK Unit Kerja 	



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN BATAN**

Nomor	: SOP 040.002/OT 02 01/KA
No. Revisi/Terbitan	: 0 / 1
Tanggal Berlaku	: 18 Agustus 2014
Halaman	: 18 dari 18

NO	PROSES	Pelaksana								Mutu Baku Kelengkapan / Standar			
		Ka. Unit Kerja/Satker	Tim	Ka. BP	Sestama	Para Deputi	Ka. BATAN	Inspektorat	Kemenkeu	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.3.11.	Melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian PK Unit Kerja									<ul style="list-style-type: none"> Dokumen PK Unit Kerja DIPA Petikan Satker 	12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Laporan Keuangan 	
6.3.12.	Menyusun dan menetapkan LAKIP Unit Kerja									<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Laporan Keuangan 	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen LAKIP Unit Kerja 	